

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Menurut (Afriza, Sastrayuda, dan Sedarmayanti, 2018) pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu kata “pari” dan “wisata”. Yang dimana pari artinya banyal, berkali-kali, berputar-berputar. Sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian. Sedangkan Herman V. Schulalard (ahli ekonomi bangsa Austria, 1910) mengatakan kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan perekonomian yang secara langsung adanya seseorang yang masuk, pendiaman, dan pergerakan orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.

Menurut UU RI No.10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Dalam suatu pembangunan wilayah pembangunan pada sektor pariwisata menjadi hal yang sangat berperan penting. Oleh karena itu tidak sedikit sektor pariwisata menjadi pelaksanaan pembangunan yang selalu diutamakan karena menurut Dara Windiyarti, dkk (1994 : 92-93) pembangunan pada sektor pariwisata akan berdampak pada aktivitas baru pada masyarakat seperti tumbuhnya lapangan kerja dan tumbuhnya perekonomian masyarakat sehingga menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

Pariwisata memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan akan tetapi adanya pihak-pihak lain yang ikut andil dalam pembangunan elemen pendamping. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Iarry E. Helber dalam bukunya perencanaan pariwisata dimulai dari pengembangan pariwisata daerah dari segi

objek dan atraksi wisata. Setelah itu kita akan dapat melihat bagaimana perkembangannya dari jumlah pengunjung apabila mencapai target yang diinginkan maka selanjutnya dipikirkan system prioritas. Dalam hal pengembangan ini diperlukan pendekatan-pendekatan antara organisasi pariwisata yang ada yaitu pemerintah dan swasta dan pihak-pihak terkait lainnya yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Dalam perencanaan maupun pengembangan kepariwisataan perlu dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lain. Hal ini bertujuan untuk menentukan kebijakan yang mendukung sehingga jenis dan macam pariwisata dapat dikembangkan berdasarkan yang diharapkan. Karena pembangunan pariwisata selalu berhubungan dengan aspek ekonomi maka klasifikasi tentang jenis pariwisata dianggap penting untuk dapat mendapatkan berapa penghasilan devisa yang diterima dari suatu pariwisata yang dikembangkan. Dan juga pemberian klasifikasi berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan atau untuk data penelitian yang diperlukan dalam perencanaan di masa yang akan datang (Afriza, Sastrayuda, dan Sedarmayanti, 2018).

2.1.1 Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut (Sari, 2011:45-47) ada lima unsur komponen pariwisata yang sangat penting, yaitu:

- a) Attractions (daya tarik), attractions dapat digolongkan menjadi site attractions dan event attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanendengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerahtujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.
- b) Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan), fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan.

- c) Infrastructure (infrastruktur), daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan.
- d) Transportations (transportasi), dalam objek wisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.
- e) Hospitality (keramahtamahan), wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi.

2.1.2 Pelaku Pariwisata

Pelaku Pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik adalah:

1. Wisatawan, adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik social, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
2. Industri Pariwisata/Penyedia Jasa, adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam 2 golongan utama, yaitu :
 - a. Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah

hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.

- b. Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.
3. Pendukung Wisata, adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.
4. Pemerintah, adalah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-masing.
5. Masyarakat Lokal, adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu pemeran penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat local merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang di kunjungi sekaligus di konsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada ditangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata dan juga hampir sepenuhnya milik mereka.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan Non Government Organisation (NGO) yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan diberbagai bidang, termasuk bidang pariwisata.

2.1.3 Pengembangan Pariwisata

Menurut (Sastrayuda, 2010:6-7) mengemukakan dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

2.1.4 Kriteria Pengembangan Pariwisata

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menetapkan beberapa kriteria pengembangan pariwisata dimasa yang akan datang adalah:

- 1) Pengembangan pariwisata harus didasarkan atas hasil musyawarah dengan kemufakatan seluruh stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat),
- 2) Pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat, baik manfaat material, spiritual, kultural maupun intelektual,
- 3) Pengembangan pariwisata harus didasarkan atas prinsip-prinsip lingkungan dan ekologi yang sehat, peka terhadap atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi keagamaan yang dianut oleh penduduk setempat, serta tidak menempatkan penduduk setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia,

- 4) Pengembangan pariwisata hendaknya dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak melebihi ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan (Renstra Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005-2009).

2.2 Desa Wisata

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Menurut Julisetiono (2007), Konsep Desa Wisata, meliputi:

- a) berawal dari masyarakat,
- b) memiliki muatan lokal,
- c) memiliki komitmen bersama masyarakat,
- d) memiliki kelembagaan,
- e) adanya keterlibatan anggota masyarakat,
- f) adanya pendampingan dan pembinaan,
- g) adanya motivasi,
- h) adanya kemitraan,
- i) adanya forum Komunikasi,
- j) adanya studi orientasi.

2.2.1 Kriteria Desa Wisata

Menurut (Nuryanti, 1993), kriteria desa wisata meliputi:

1. atraksi wisata yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa,

2. jarak tempuh adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten,
3. besaran desa menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa,
4. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa,
5. ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

2.2.2 Pengembangan Desa Wisata

Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat. Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.
- b) Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.

- c) Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.
- d) Memberdayakan masyarakat desa wisata, unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata Inti Rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari
- e) Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan. Pengembangan suatu desa menjadi desa wisata harus memperhatikan kapasitas desa tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (home stay), penyediaan kebutuhan konsum~ wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti a~dong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

2.2.3 Prinsip Pengembangan Desa Wisata

Prinsip dasar pengembangan desa wisata, meliputi:

1. pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa,

2. fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki,
3. pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan.

2.3 Stakeholder

2.3.1 Konsep Stakeholder

Menurut pendapat Freedman stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan sebagai dampak aktivitasnya. Freedman menjelaskan jika stakeholder bisa dipengaruhi oleh tujuan organisasi dan kemudian secara bergantian dapat mempengaruhi tujuan organisasi tersebut.

Stakeholder juga memiliki kepentingan mereka masing-masing, dan bisa saling mempengaruhi keputusan mereka. Individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat dapat disebut sebagai stakeholder jika memenuhi karakteristik seperti: memiliki kekuasaan, legitinasi, dan kepentingan terhadap program. (Oktavia, 2013).

Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang saling memiliki kepentingan, ikut serta terlibat, dan dipengaruhi atau mempengaruhi suatu kebijakan atau program pembangunan. Setiap stakeholder memiliki kepentingan masing-masing yang bisa berbeda satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan. Peranan stakeholder perlu dipahami karena setiap stakeholder yang terlibat bisa memberi dampak, atau terkena dampak dari program yang dikerjakan. (Amalyah, 2016).

Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas, stakeholder atau pemangku kepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, yang terlibat dalam suatu program, dan saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi.

2.3.2 Klasifikasi Stakeholder

Menurut (Bramana, 2017:3) stakeholder dapat dibedakan menjadi tiga dengan perannya masing-masing, yaitu :

- a) Stakeholder Primer (utama), adalah stakeholder yang dalam keterlibatannya menerima dampak positif atau negative, diluar kerelaannya dari suatu program.
- b) Stakeholder Sekunder (penunjang), adalah pihakstakeholder yang menunjang atau sebagai perantara dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Pihak yang bisa digolongkan sebagai stakeholder sekunder adalah penyandang dana, pelaksana kegiatan, LSM dan organisasi lain. Dalam kegiatannya mereka bisa bersifat perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing.
- c) Stakeholder kunci, adalah stakeholder yang memegang peranan penting yang berpengaruh kuat terhadap kelancaran kegiatan atau program yang dilaksanakan. Peranan stakeholder kunci sangat berpengaruh sehingga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Menurut (Wakka, 2014), stakeholder dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- a) Stakeholder primer, adalah stakeholder yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumberdaya yang ada, dan ikut terlibat secara langsung.
- b) Stakeholder sekunder, adalah stakeholder yang mempunyai minat dan kepentingan, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung, dan bergantung kepada pihak lain.

Menurut (Mahfud, 2015), mengklasifikasikan stakeholder Pembangunan seperti berikut, yaitu:

1. Policy creator, berperan merumuskan suatu program dan mengambil keputusan kebijakan.

2. Koordinator, memiliki peran sebagai koordinator yang mengatur aktor-aktor yang ikut serta.
3. Fasilitator, memiliki peran mencukupi kebutuhan aktor yang terlibat, dan memberi fasilitas apa saja yang diperlukan.
4. Implementer, sebagai pelaksana program yang telah ditetapkan.
5. Akseptor, berperan untuk meminimalisir faktor yang bisa menghambat dan mengidentifikasi faktor yang bisa mempercepat selesainya program/proyek.

2.3.3 Analisis Peran Stakeholder

(Brahmana, 2017), mengemukakan bahwa pemerintah dalam Pembangunan suatu objek memainkan peranan yang penting. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang dominan dalam pembangunan dan pengembangan suatu objek. Peranan penting yang dilakukan pemerintah mencakup hal-hal seperti:

1. Modernisator
Dalam pembangunan, pemerintah bertujuan untuk memodernisasikan masyarakat dengan meninggalkan gaya hidup yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Tujuan pembangunan dan pengembangan adalah menjadikan negara kuat, mandiri, tidak tertinggal dari negara lain, dan produktif.
2. Katalisator
Peran pemerintah sebagai katalisator adalah meminimalisir faktor negative dalam Pembangunan supaya tetap bisa dikontrol, dan mengidentifikasi factor pendorong yang bisa memajukan pembangunan dan pengembangan. Kedua factor tersebut perlu diperhitungkan oleh pemerintah sebagai katalisator.
3. Dinamisator
Sebagai dinamisator pemerintah berperan untuk mendorong masyarakat supaya progresif dalam Pembangunan dengan tetap memberi bimbingan dan arahan tujuan pembangunan.
4. Stabilisator

Sebagai stabilisator, stakeholder berperan untuk mencegah terjadinya gejolak sosial di masyarakat bila terjadi perubahan. Mereka melakukan control sosial dan sebisa mungkin bila terjadi gejolak tetap melakukan pendekatan yang bersifat persuasive.

5. Pelopor

Sebagai pelopor stakeholder diharapkan menjadi sebuah role model dalam pembangunan. Role model yang dimaksud adalah bagaimana stakeholder bisa menjadi tuntunan dalam hal pengembangan dan pembangunan.

Analisis peran stakeholder dimaksudkan untuk mengidentifikasi individu, kelompok, atau organisasi mana yang terlibat, dan saling mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pembuatan keputusan, serta seperti apa peran mereka dalam Pembangunan dan pengembangan suatu objek atau program.

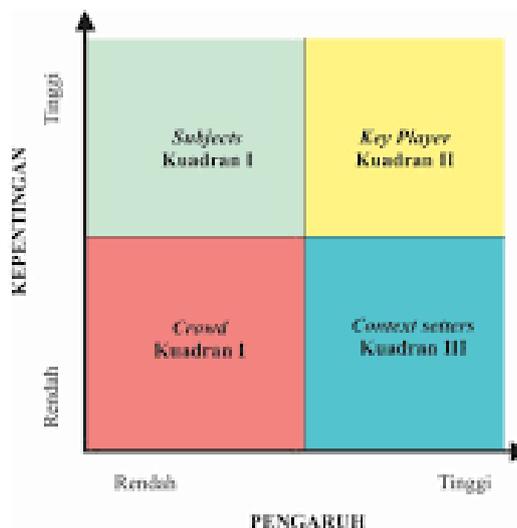
Analisis peran stakeholder berperan untuk mengidentifikasi bagaimana peran masing-masing aktor yang terlibat mulai dari proses pembuatan keputusan, implementasi hingga keluaran yang dihasilkan. Menurut (Oktavia, 2013:233) menganalisis peran stakeholder dengan melihat aspek pengaruh (power) dan kepentingan (importance) masing-masing stakeholder. Atribut yang dimiliki stakeholder tersebut di analisis sesuai dengan masalah yang ada, kemudian masing-masing stakeholder yang terlibat diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut peranannya masing-masing.

Cara menganalisis stakeholder dapat dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, kemudian mengklasifikasikan masing-masing stakeholder, dan menyelidiki hubungan antara stakeholder yang terlibat.

Mengklasifikasikan stakeholder dengan matriks pengaruh (power) dan kepentingan (interest). Pengaruh (power) mengacu pada kekuatan stakeholder dalam mengontrol proses mulaidariawalkegiatanhinggaoutput program. Semakin besar pengaruh suatu stakeholder dapat mempengaruhi kelancaran program. Sedangkan kepentingan (interest) mengacu pada kepentingan suatu stakeholder pada sebuah program dalam pencapaian tujuan atau output.

(Oktavia, 2013:233) Klasifikasi stakeholder dapat dijelaskan terdiri dari empat kuadran sebagai berikut:

- a. Context setter, adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang besar, namun hanya memiliki sedikit kepentingan. Context setter sebagai stakeholder perlu diawasi karena dapat memiliki resiko yang signifikan.
- b. Key player, sebagai stakeholder termasuk aktif karena mereka memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dalam pengembangan suatu program/kegiatan.
- c. Subjects, adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang rendah tetapi mereka memiliki kepentingan yang tinggi. Dampak mereka terhadap suatu kegiatan/program tidak terlihat, namun pengaruh mereka bisa tumbuh jika bekerjasama dengan stakeholder lain.
- d. Crowd, adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan yang tinggi namun juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tetapi hal tersebut menjadikan pertimbangan untuk tetap mengikut sertakan mereka dalam pengambilan keputusan, karena pengaruh dan kepentingan bersifat dinamis, sehingga sebagai bahan pertimbangan.



Gambar 2.1 Matriks Analisis Peran Stakeholder

Sumber: (Nuryusriana dan Ahmad Sarwadi, 2021)

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Dari berbagai partisipasi masyarakat banyak hal yang dapat diserap, diantaranya rasa kompetisi, rasa tanggung jawab dan solidaritas.

Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan "keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain". Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat selalu terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam program/proyek/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah/negara. Sehingga disini terbedakan dengan jelas antara pihak yang berperan sebagai pelaku/penginisiatif dengan pihak yang hanya terlibat/partisipan (Salman, 2005).

2.4.1 Bentuk-bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61), mengidentifikasi macam bentuk partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. (participation in decision making).
Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama terkait dengan penentuan alternatif dengan masyarakat terkait dengan ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini, masyarakat dituntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Bentuk partisipasi ini antara lain kehadiran pada pertemuan, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing).
Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pengerahan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits).

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini terkait dengan masalah pelaksanaan program secara keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

(Desseldorp, 1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 5) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Berdasarkan (Sastropoetro, 1998) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari:

1. Pikiran, merupakan jenis partisipasi level pertama yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
2. Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua untuk mendayagukannya secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan
3. Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga yang digunakan bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan
4. Kehalihan/keterampilan, merupakan jenis partisipasi pada level keempat untuk menentukan suatu kebutuhan
5. Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan

6. Uang/harta benda, merupakan jenis partisipasi pada level keenam, sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu (Slamet, 1985) mengidentifikasi mengenai adanya keragaman masyarakat dalam berpartisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Beberapa keragaman berdasarkan input tersebut meliputi:

- 1) Ikut memberikan input dalam artian menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Contohnya keterlibatan masyarakat dalam proyek padat-karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
- 2) Ikut memberikan input dalam artian tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, akan tetapi ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Contohnya sering dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan lingkungannya. Keduanya hampir mirip akan tetapi pada point nomor 2 warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan tidak memperoleh imbalan atas korban yang diberikan.
- 3) Ikut memberikan input dalam artian menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Contohnya para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang. Meskipun para pekerja tersebut turut berpartisipasi dalam pembuatan hotel akan tetapi mereka tidak akan dapat menikmati hasil pembangunannya karena tidak akan mampu membayar sewa hotelnya.
- 4) Ikut memberikan imbalan dan menerima hasil pembangunan tetapi tidak turut memberikan input. Partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki di dalam proses pembangunan karena partisipasi dalam bentuk ini biasanya dijumpai pada “pihak ketiga” dalam pelaksanaan pembangunan.
- 5) Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Contoh kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh para

penyumbang (donatur) atau sponsor-sponsor kegiatan sosial seperti pendirian panti asuhan, dan lain-lain.

Dari kelima macam keragaman partisipasi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Bentuk partisipasi nomor 2 seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan pada point nomor 1 hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapis-bawah”, sedangkan partisipasi pada nomor 5 seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan “bawah”. Selain itu juga point nomor 4 seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam relitanya akan sangat sulit dihindari.

2.4.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah Arnstein (Kusumastuti, 2004), yaitu:

- 1) Kontrol masyarakat (Citizen Control), dalam tingkat ini control masyarakat terjadi dalam segala aspek, misalnya control terhadap sekolah, ataupun terhadap lingkungan.
- 2) Pelimpahan kekuasaan (Delegated Power), negosiasi antara penduduk dan pemerintah diperoleh melalui pembuatan keputusan dominant yang berada di tangan masyarakat dengan mendelegasikan pendapatnya melalui wakil dalam parlemen.
- 3) Kemitraan (Partnership), adanya kesepakatan untuk berbagai perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan melalui struktur kerjasama kebijaksanaan, komite perencanaan dan mekanisme yang memecahkan persoalan.
- 4) Penenteraman (Placation), masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh melalui tokenism jelas terlihat, tapi pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut tergantung pelaksanaan dari prioritas yang ditetapkan golongan elit.
- 5) Konsultasi (Consultation), masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan opini mereka, tapi tidak dikombinasikan dengan kepastian bahwa perhatian dan ide mereka akan diperhitungkan.
- 6) Informasi (Informing), penekanan bentuk partisipasi dalam pemberian informasi satu arah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tanpa

disediakan umpan balik dan kekuatan untuk negosiasi. Seringkali informasi disampaikan terlambat dibanding perencanaannya.

- 7) Terapi (Therapy), bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menggalang masyarakat dalam kegiatan yang intensif, tapi fokusnya bukan untuk mengobati mereka dari penyakit yang dihadapi, tetapi lebih merupakan tindakan yang rasial dan penipuan yang menciptakan penyakit tersebut.
- 8) Manipulasi (Manipulation), partisipasi terjadi dimana kelompok social elit yang minoritas menjadi pelaksana dan penentu pelaksanaan komite/organisasi. Tujuan utama sebenarnya bukan untuk memberikan kesempatan masyarakat yang kurang mampu untuk mempunyai suara, tetapi digunakan untuk kepentingan minoritas tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan teori tangga partisipatori yang ditulis oleh Arnstein sebagai (a ladder of citizen participation) yang ditunjukkan melalui tabel klasifikasi tingkatan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat

No.	Klasifikasi	Tingkatan	Keterangan
1.	Citizen Power	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol masyarakat (citizen control) • Pelimpahan kekuasaan (delegated control) • Kemitraan (partnership) 	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
2.	Tokeinisme	<ul style="list-style-type: none"> • Penentraman (placation) • Konsultasi (consultation) • Informisi (informing) 	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan
3.	Non Participation	<ul style="list-style-type: none"> • Terapi (therapy) • Manipulasi 	Masyarakat hanya dijadikan objek

No.	Klasifikasi	Tingkatan	Keterangan
		(manipulation)	

Sumber: Sherry R Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners* 35.1969, hal 216-224 dalam Bruce Mitchell, *Resources and Environmental Management, First Edition*. Addison Wesley Longman Limited.1997, hal 187.

Oktami Dewi A. A. P Jurusan Antropologi, Makassar (2013, hal: 10) Ada berbagai tingkatan dan arti partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Partisipasi Manipulasi (Manipulative Participation) Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.
- b. Partisipasi Pasif (Passive Participation) Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengar respon dari rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut. Informasi yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional.
- c. Partisipasi Melalui Konsultasi (Participation by Consultation) Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisa. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.
- d. Partisipasi Untuk Insentif (Participation for Material Incentives) Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.
- e. Partisipasi Fungsional (Functional Participation) Partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target

proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu mungkin cukup menarik, dan mereka juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa yang bersangkutan.

- f. Partisipasi interaktif (Interactive Participation) Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.
- g. Partisipasi inisiatif (Self-Mobilisation) Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.

2.4.3 Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Sementara itu, dalam partisipasi masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

1. Faktor internal

Menurut (Slamet, 2003:137-143) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan. Secara teoritis,

terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat 29 partisipasi seperti umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, besar pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal

Menurut (Sunarti, 2003:9) faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan pariwisata adalah pemilik pariwisata, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.4 Tinjauan Kebijakan

2.4.1 Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional. Bahwa tujuan Pembangunan Pariwisata adalah:

- 1) mengembangkan diversifikasi produk dan kualitas Pariwisata Nasional,
- 2) berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan sumberdaya (pesona) alam lokal,
- 3) mengembangkan serta memperluas pasar wisata.

Dari poin Undang-undang tersebut yang menjadi elemen penting terciptanya keberhasilan suatu pengembangan pariwisata adalah pariwisata yang berbasis pada masyarakat. Yang dimana perencanaan, pengembangan sampai pengelolaan dilakukan pure oleh masyarakat Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, sustainable tourism development, rural tourism, ecotourism, merupakan pendekatan pengembangan

kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

2.4.2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan berbagai pengertian diantaranya adalah wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, sebagai berikut:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melaksanakan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Selain itu juga diutarakan tentang daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha pariwisata, industri pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata sebagai berikut:

1. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 18 dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
2. Daerah tujuan pariwisata disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

3. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
4. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
5. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
6. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selain kegiatan perjalanan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Di dalam pariwisata terdapat daya tarik wisata yang mengandung arti yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan adanya kepariwisataan bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Menghapus kemiskinan
- d) Mengatasi pengangguran

- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f) Memajukan kebudayaan
- g) Mengangkat citra bangsa
- h) Memupuk rasa cinta tanah air
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j) Mempererat persahabatan antarbangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan juga memamparkan pembangunan kepariwisataan berdasarkan asas sebagaimana, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

2.5 Studi Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong	Safirilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani	2021	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi adalah keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan mendapatkan pembagian peran yang lebih jelas.
2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan desa wisata Negeri	Rachmat Hidayat Romeon dan Annisa Mu'awanah	2021	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata baik selaku pemilik resort, pedagang, maupun karyawan resort serta

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
	Saleman Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah	Sukmawati			penyedia jasa. Selain itu diketahui bahwa tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa wisata didominasi oleh masyarakat lokal Negeri Saleman. Hal ini dikarenakan faktor yang melatar belakangi adalah potensi sumber daya alam wisata alam yang dimiliki sangat menarik untuk dieksplorasi oleh wisatawan dan faktor ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
3.	Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari	Dewa Putu Bagus Pujawan Putra	2020	Penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat adalah consultation dengan sifat semu dan pasif, masyarakat minim partisipasi dan hanya memperoleh manfaat ekonomi. Faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi pemahaman desa wisata, badan pengelola desa wisata, sumber daya manusia, dan pemetaan produk unggulan desa, sementara faktor eksternal berupa kajian desa wisata, sumber dana dan program

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
					<p>pemberdayaan masyarakat serta pemasaran. Saat ini, model partisipasi masyarakat mengarah pada top down. Sementara itu, metode alternatif menawarkan gagasan agar masyarakat bersama pemerintah dan akademisi turut berpartisipasi mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata alam dan budaya yang dikelola Badan Pengelola Desa Wisata. Harapannya dengan begitu mampu bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi, revitalisasi budaya lokal, dan konservasi lingkungan. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah tidak semua desa wisata memiliki masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap desa wisata.</p>
4.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi pada Desa	Sukur Suleman dan Christina Kahumata	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Gamtala telah menjadikan desa tersebut sebagai destinasi wisata dengan konsep desa wisata. Untuk membangun desa wisata, pemerintah desa berusaha mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
	Wisata Gamtala, Kabupaten Halmahera Barat)				Namun, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini belum optimal, karena komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik. Akibatnya, tidak semua masyarakat mengetahui program pemerintah terkait pengembangan desa wisata.
5.	Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata “Watu Rumpuk” Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun	Yusuf Adam Hilman dan Muhammad Saeful Abdul Aziz	2019	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menjelaskan tentang Pengelolaan desa wisata di Desa Mendak baik pada obyek wisata dan potensi wisata alam jalur pendakian puncak Tapak Bima yang harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pengelolaan. Hal tersebut merupakan salah satu karakteristik pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yaitu adanya tanggungjawab masyarakat terhadap potensi dan objek wisata sehingga dalam pengelolaan desa wisata di Desa Mendak, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
					evaluasi akan mendorong rasa memiliki terhadap potensi dan objek wisata yang akan menjamin kelestarian/keberlanjutan potensi dan objek tersebut.
6.	Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat	Dinar Wahyuni	2019	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata. Pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa hingga pengambilan keputusan tentang pembentukan desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan pemikiran, materi, dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan desa wisata yang siap bersaing di industri pariwisata. Partisipasi dalam tahap menikmati hasil ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pentingsari akibat

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
					kegiatan wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati hasil dari kegiatan wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam pertemuan rutin antar pengelola desa wisata, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat.
7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Potensi Desa di Kampung Wisata Situ Gede	Popy Marysya dan Siti Amanah	2018	Penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sebuah pariwisata dianggap sebuah hal yang menjadi pemicu pengembangan suatu kawasan wisata. Kelurahan Situ Gede merupakan tempat wisata baru yang memaksimalkan partisipasi masyarakat sekitar yang menjadi pengelola kawasan dalam pengembangan kawasan wisata. Berkembangnya suatu kawasan wisata didukung dari partisipasi masyarakat dalam mengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
					potensi desa di kawasan wisata Situ Gede, Bogor. Penentuan responden melalui metode survey yang disebar ke 30 pelaku usaha wisata di Situ Gede. Karakteristik responden yaitu umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan dan lama menetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara umur, lama menetap dan potensi kawasan wisata dengan tingkat partisipasi.
8.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Tabalansu, Papua	Ika Pujiningrum Palimbunga	2018	Metode kualitatif, analisis deskriptif	Hasil penelitian mengungkapkan bentuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang masih kurang, dan membuat kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan pariwisata termasuk masyarakat lokal di desa Tablanusu.
9.	Pengelolaan Desa	Dimas Kurnia dan	2016	penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
	Wisata Dalam Perspektif Community Based (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)	Purmada Wilopo Luchman Hakim		menggunakan metode kualitatif deskriptif	Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan community based tourism dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu citizen control.
10.	Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal didesa wisata jati luwih tabanan bali.	Made heny A, chafid pindeli, m. Baiquni	2013	Metode kualitatif, analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian dalam tulisan

No	Judul	Nama Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
					<p>ini dilakukan di desa wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2023